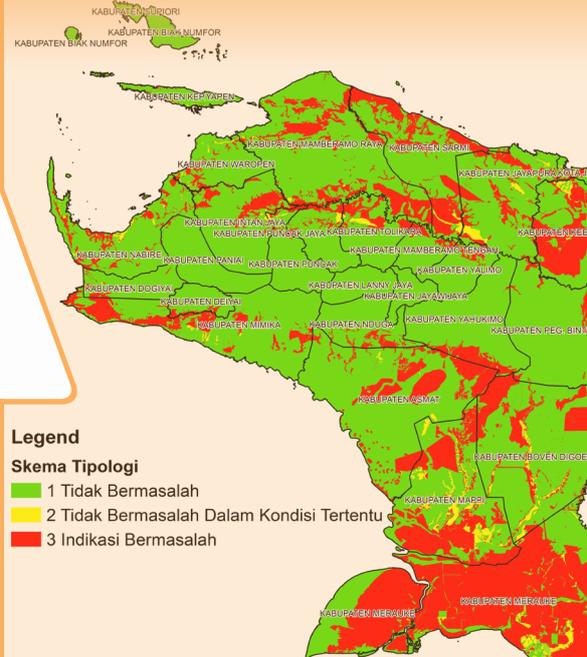
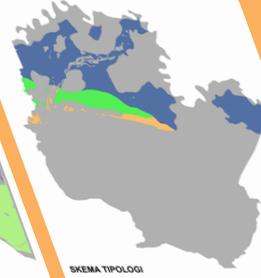
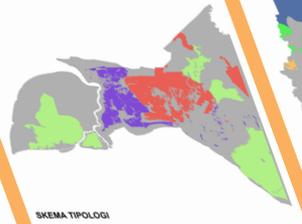
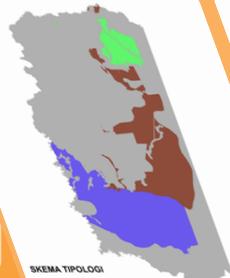
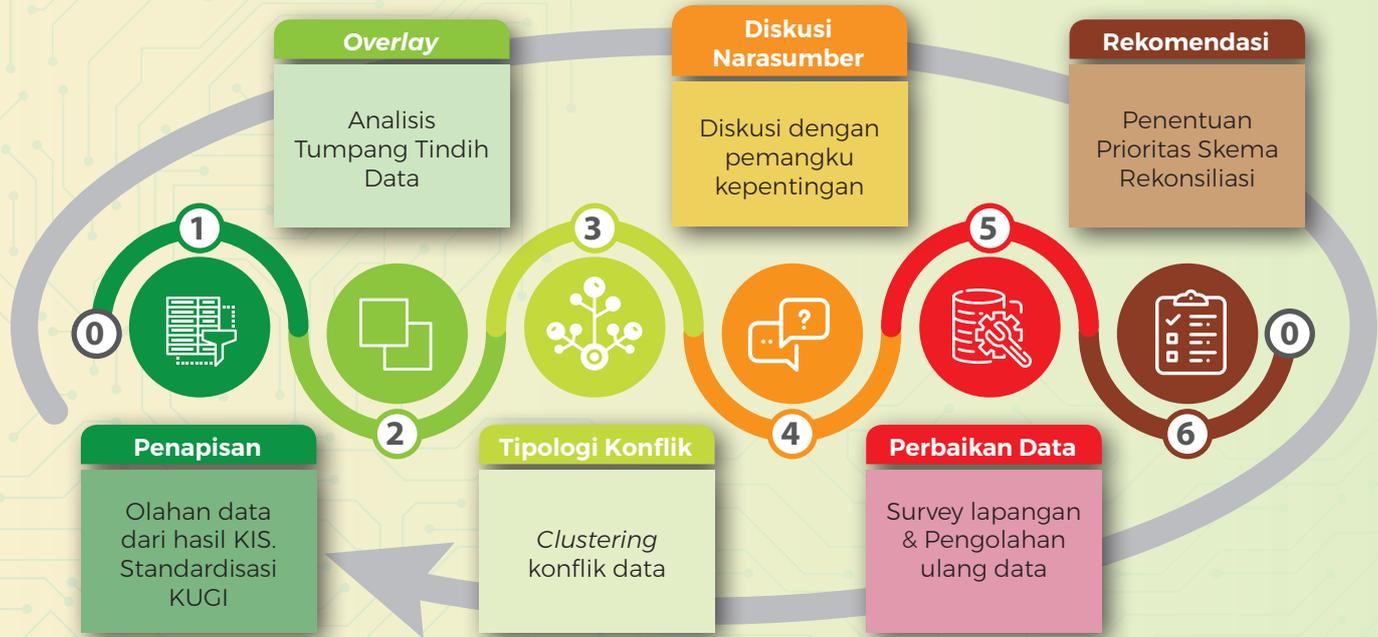


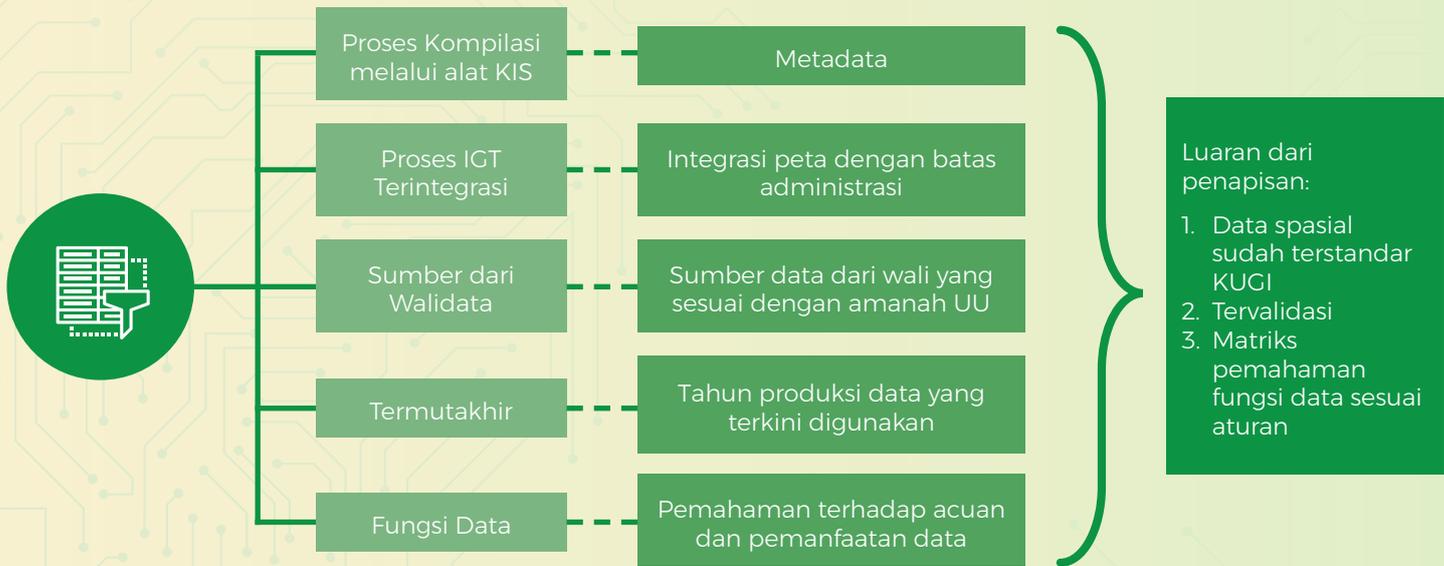
# PENILAIAN KONFLIK DAN INKONSISTENSI DATA



# PENILAIAN KONFLIK DAN INKONSISTENSI DATA



# 1. PENAPISAN

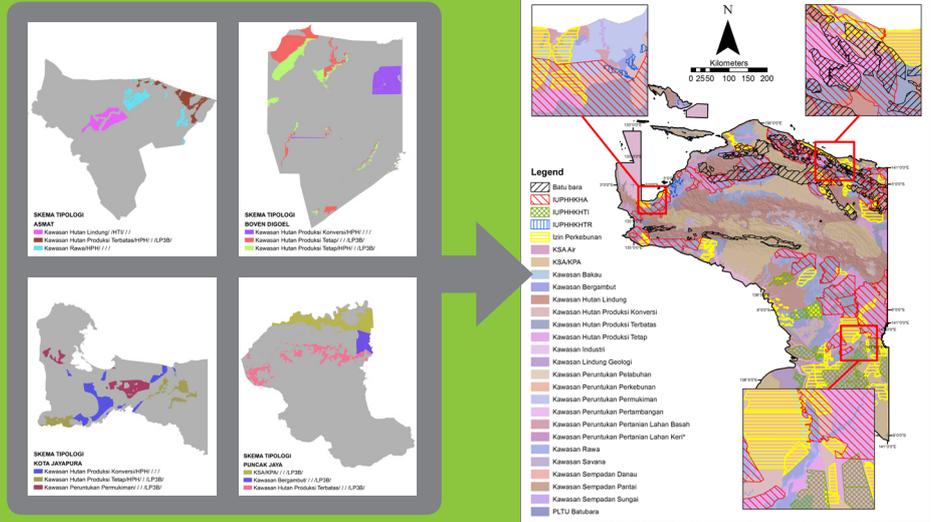


Data spasial memiliki banyak peruntukkan dan fungsi, seri waktu serta walidatanya. Ini adalah hal yang umum dan wajar karena setiap instansi pemerintahan dan lembaga memiliki tupoksi dan capaian berbeda. Dalam konteks perencanaan daerah, data yang beragam tersebut harus dilebur, diramu dan disaring sehingga menjadi kesatuan. Timbul masalah ketidakseragaman data yang beredar. Disebabkan karena aturan tentang KUGI/satu peta belum terlaksana secara menyeluruh. Penapisan data bertujuan untuk menyaring semua data yang ada sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam aturan, dimulai dari pemeriksaan metadata, walidata, terbaru, serta pemahaman terhadap data itu sendiri. Ini langkah awal yang menentukan dalam proses rekonsiliasi

## 2. OVERLAY/TUMPANG TINDIH



Data spasial yang telah melalui tahap penapisan akan diolah lebih lanjut melalui analisis tumpang tindih/*overlay* menggunakan perangkat lunak pemetaan. Perlu diketahui data dari penapisan menentukan hasil dari *overlay*, jika data tidak benar maka hasilnya juga tidak benar. Karena dalam proses verifikasi ada di tahap sebelumnya. Luaran dari proses ini adalah bentuk-bentuk kesesuaian ataupun ketidaksesuaian data dengan acuan dan fungsinya. Disajikan dalam bentuk peta, tabel, dan matriks. Semakin detail data yang dimiliki maka dapat disorot ke unit terkecil, seperti dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Masing-masing dapat dilihat dimana saja ketidaksesuaian fungsi, lokasi, dan luasan.



### 3. TIPOLOGI KONFLIK: *CLUSTERING* KONFLIK DATA



Tipologi Konflik Data adalah Pengelompokan menurut karakter suatu masalah/konflik data masing-masing. Jenis-jenis konflik mengacu pada tabel fungsi data di langkah penapisan. Jika ada benturan antar data yang tidak sesuai dengan fungsinya maka itulah data yang dianggap berkonflik. Tabel acuan fungsi tersebut sudah mengacu pada peraturan dan pemahaman daerah masing-masing atau istilahnya sesuai dengan konteks lokal. Karena tiap daerah punya keunikan dan catatan tersendiri dalam memanfaatkan ruangnya.



## MATRIKS ACUAN FUNGSI

No	Kelas Pola Ruang	IUPHHK-HT	IUPHHK-RE	HTR	HGU	LP2B/ Pertanian	Tambang
1	Danau	X	X	X	X	X	X
2	Dermaga	X	X	X	X	X	X
3	Gambut	O	O	O	O	O	O
4	Hutan Lindung	X	X	X	X	X	O tambang tertutup
5	Hutan Plasma Nutfah Ramin	X	X	X	X	X	X
6	Hutan Produksi	O	O	O	X	O skema izin pinjam pakai	O skema izin pinjam pakai
7	Hutan Produksi Konversi	X	X	X	O setelah pelepasan	O setelah pelepasan	O setelah pelepasan
8	Hutan Produksi Terbatas	O	O	O	X	O skema izin pinjam pakai	O skema izin pinjam pakai
9	Kawasan Industri	X	X	X	X (HGB boleh)	X	X
10	Kawasan Pelabuhan	X	X	X	O	X	X
11	Kawasan Penyangga (Buffer Zone)	X	X	X	O	O	O
12	Perkebunan	X	X	X	O	X	O,





## DAFTAR KONFLIK ATAU TUMPANG TINDIH DATA

NO	SKEMA	TIPO_TATAKAN	TIPO_IZIN	TIPOLOGI	LUAS
1	Suaka Marga Satwa///LP3B	1	3	3	59275,72
2	Hutan Lindung///LP3B	1	3	3	34337,53
3	Hutan Lindung//Tambang/	1	2	2	32936,30
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan/ /Kebun/ /LP3B	1	3	3	47,88
5	Kawasan Sempadan Sungai/ /Kebun/ /LP3B	1	3	3	47,51
6	Kawasan Hutan Produksi Konversi/ /Kebun/ /	1	3	3	31,72
7	Kawasan Hutan Lindung///LP3B	1	3	3	144,11
8	Kawasan Sempadan Pantai///LP3B	1	3	3	3,04
9	Hutan Lindung///LP3B	1	3	3	1,44
10	Kawasan Hutan Produksi Tetap///LP3B	1	3	3	656,07
11	Hutan Lindung/ /Kebun/ /	1	3	3	15005,20
12	Kawasan Hutan Produksi Tetap/ /Kebun/ /	1	3	3	10981,84
13	Kawasan Hutan Produksi Tetap/ /Kebun/ /LP3B	1	3	3	1920,73
14	Hutan Lindung///LP3B	1	3	3	43755,48
15	Kawasan Hutan Produksi Tetap///LP3B	1	3	3	33092,86
16	Hutan Lindung/ /Kebun/ /LP3B	1	3	3	15505,43

## 4. INFORMANTS TALKS

### DISKUSI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

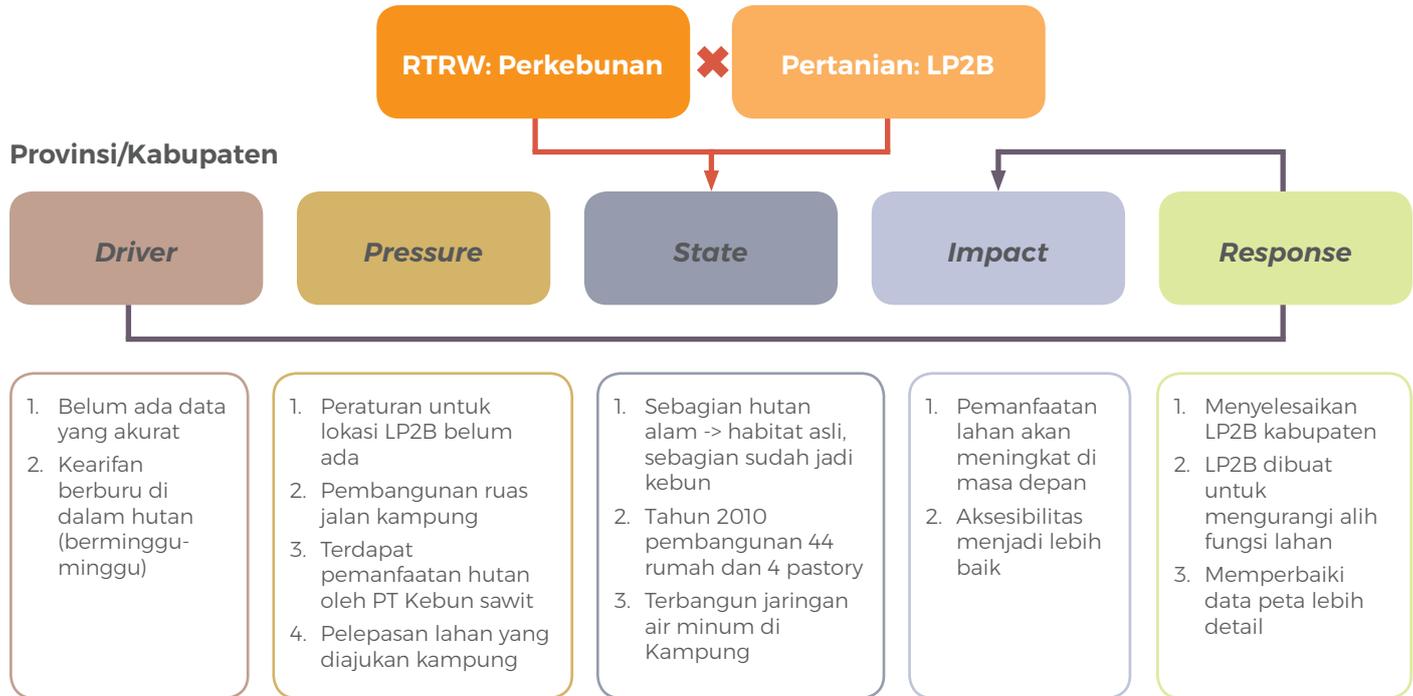


Hal-hal yang sudah didefinisikan sebagai konflik dapat diselesaikan dengan verifikasi kepada manusia. Proses selanjutnya adalah menggali informasi dengan cara diskusi bersama para walidata serta wawancara ke pemegang informasi dari berbagai pihak di daerah. Kasus per kasus dapat dilihat, dibagi berdasarkan jenis konflik, scope nya dapat diperkecil ke tingkat kabupaten, kecamatan dan hingga desa. Disesuaikan dengan data yang tersedia di daerah dan pengetahuan walidata/narasumber. Kerangka kerja DPSIR (Burkhard, Benjamin & Müller, Felix. (2008). *Drivers-Pressure-State-Impact-Response*) dapat digunakan untuk memandu diskusi, dengan menggali akar masalah setiap konflik data, lalu merumuskan rekomendasi sementara yang tepat berdasarkan masalah atau dampak dari konflik tersebut.

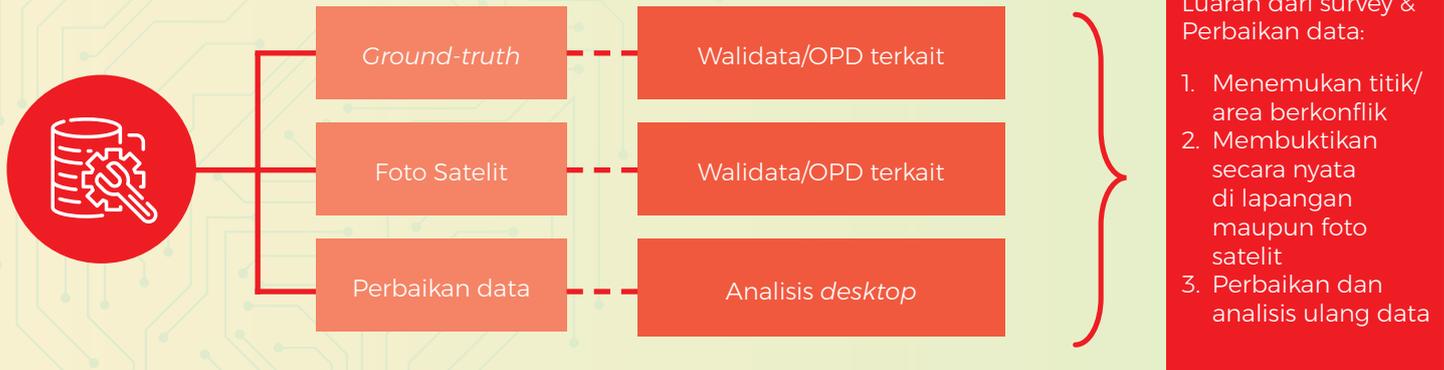


# DPSIR

## SKEMA: KETIDAKSESUAIAN ANTARA PERKEBUNAN DENGAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



## 5. SURVEY LAPANGAN & PENGOLAHAN ULANG DATA

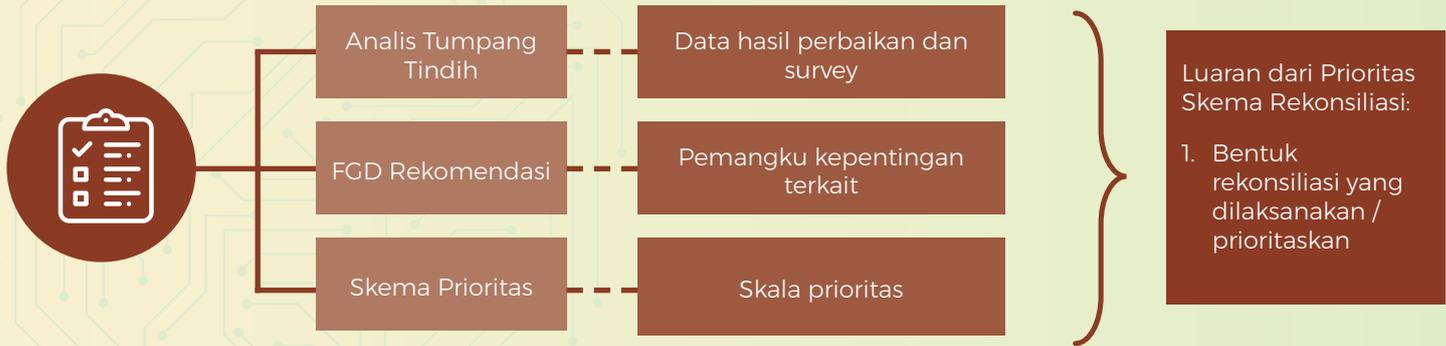


Hasil FGD dan Wawancara terkait konflik data ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ke lapangan. Beberapa titik yang dianggap bermasalah perlu dilakukan survey atau *groundtruth* untuk dibuktikan secara nyata dari hasil interpretasi tumpang tindih. Multi pihak mesti terlibat pada saat survey supaya dapat kesepakatan bersama perihal konflik data yang ditemukan. Jika hal tersebut benar, maka selanjutnya ada melakukan perbaikan data spasial sesuai hasil rekomendasi diskusi. Sehingga, data peta yang bermasalah dapat dianalisa ulang.



Survey menunjukkan perbatasan antara pertanian dan perkebunan secara langsung, diasumsikan pembuatan garis dalam peta dapat tumpang tindih

## 6. PENENTUAN PRIORITAS SKEMA REKONSILIASI



Diskusi permasalahan konflik dan ditelusuri dengan survey lapangan untuk membuktikan kebenaran dari analisa. Seperti tahapan keempat, dapat saja terjadi kesalahan dari pembuat data atau masalah resolusi data. Hasil survey diperbaiki dan dianalisis ulang untuk dilihat kembali konfliknya, apakah sama atau tidak. Jika sesuai antara hasil analisa dan survey maka rumusan rekomendasi yang sudah didiskusikan akan di jadikan skema rekonsiliasi. Jika ada ratusan rekomendasi yang telah dihasilkan, maka ditentukan skala prioritas untuk diselesaikan dulu.





**World Agroforestry (ICRAF) - Southeast Asia Regional Program**

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia

Tel: +(62) 251 8625 415 Fax: +(62) 251 8625416

[www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia](http://www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia) | [blog.worldagroforestry.org](http://blog.worldagroforestry.org)